



Material Batu di Kalbar Langka

■ Midji Minta Perusahaan Tambang Penuhi Izin

PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengimbau kepada perusahaan yang sudah memegang izin tambang batuan di Kalbar, agar segera memenuhi persyaratan agar bisa operasional kembali.

Sejauh ini yang menjadi permasalahan yakni banyak perusahaan pemegang izin pertambangan batuan di Kalbar belum memenuhi persyaratan, di antaranya persyaratan gudang bahan peledak hingga juru ledak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan material batu di Kalimantan Barat (Kalbar), yang juga akan berpotensi menghambat percepatan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Midji mengatakan, kelangkaan material batu setidaknya sudah terjadi di Kalbar sejak November tahun lalu. Sehingga untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah, dan lainnya harus mendatangkan material batu dari luar Kalbar. Tepatnya membeli dari daerah Merak, Provinsi Banten, yang otomatis harganya jadi lebih mahal.

"Padahal kita (Kalbar) punya tambang batuan di sini, jadi ini bukan salah kita (Pemprov) tapi lebih banyak pada perusahaan yang sudah banyak memegang izin tambang batuan harus segera memenuhi persyaratan lainnya," tegasnya.

Ia pun berharap ada solusi cepat terkait penanganan masalah kelangkaan material batu ini. Itu agar proyek-proyek yang ada di Kalbar, khususnya proyek pemba-

Kementerian ESDM saya minta ada percepatan dalam pengeluaran perizinannya, kami menyetujui asal mereka telah menyediakan gudang bahan peledak

Sutarmidji
Gubernur Kalbar

ngunan oleh pemerintah bisa cepat diselesaikan.

"Kementerian ESDM saya minta ada percepatan dalam pengeluaran perizinannya, kami menyetujui asal mereka telah menyediakan gudang bahan peledak, kepala teknik tambang, dan juru ledak," tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Sutarmidji menjelaskan untuk prosedur operasional perusahaan penambangan batu, hal yang utama bahwa perusahaan tersebut harus memiliki izin penambangan batuan.

"Kalau tidak salah saya, tahun lalu (2022) ada 50 lebih (perusahaan) yang ada izin," ujar Sutarmidji saat ditemui di Gedung Garuda Pemprov Kalbar, Rabu (15/2/23).

Selanjutnya, setelah perusahaan batu tersebut telah memiliki izin penambangan

batuan, untuk beroperasi perusahaan tersebut masih harus memenuhi persyaratan lain. Seperti izin untuk gudang bahan peledak, kemudian harus ada kepala teknik tambang (KTT), dan juga juru ledak.

"Lalu nanti kita (Pemprov) akan kirim (usulan perusahaan) ke Kementerian ESDM, dan kemudian ada persetujuan pusat kembali ke kita, kita baru akan berikan persetujuan. Lalu mereka (perusahaan) mengurus izin untuk mendapatkan bahan peledak ini melalui Pol-da, dan harus ada izin dari Mabes Polri," jelasnya.

Persoalan inilah yang menurutnya harus cepat diselesaikan. Karena kelangkaan material batu terjadi akibat perusahaan yang memegang izin tidak memenuhi syarat untuk gudang bahan peledak, serta tidak memiliki kepala teknis tambang, dan juru ledak.

"Kalau persyaratan perizinan itu keluar maka ini (bisa beroperasi). Jadi saya berharap perusahaan penambang batuan segera memenuhi persyaratan ini, kalau tidak Kalbar ini kesulitan batu," pungkasnya.

Kepala Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalbar Syarif Kamaruzaman, menyampaikan bahwa penyebab terjadinya kelangkaan batu ini disebabkan antara lain adalah pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan terkait izin penyimpanan atau penimbunan bahan peledak (Handak), sedangkan salah satu syarat untuk membeli bahan peledak adalah adanya izin gudang handak. (ang)